



SUBSTANSI

SUMBER ARTIKEL AKUNTANSI AUDITING DAN KEUANGAN

Substansi
ISSN: 2598-0106 (print)
ISSN: 2620-9853 (online)

Article 1

Volume 8, Number 1,
Year 2024

30-06-2024

KEKUATAN ORGANISASIONAL DAN SISTEM DALAM PENCEGAHAN FRAUD: SUATU TINJAUAN SYSTEM LITERATURE REVIEW

Vandy Rahmarta*

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Grace T. Pontoh

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Darwis Said

Universitas Hasanuddin, Indonesia

**Penulis Koresponden: vandy.r@pu.go.id*

Submitted:
13-01-2024

Revised:
25-05-2024

Accepted:
30-06-2024

Citation:

Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional dan Sistem Dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 8(1), 28–43. <https://doi.org/10.31092/subs.v8i1.2604>

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/2604>



Artikel ini diterbitkan secara gratis dan terbuka oleh Program Diploma III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN. Naskah ini telah diterima untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Substansi: Sumber Akuntansi, Auditing, dan Keuangan oleh Tim Editor resmi jurnal.

KEKUATAN ORGANISASIONAL DAN SISTEM DALAM PENCEGAHAN FRAUD: SUATU TINJAUAN SYSTEM LITERATURE REVIEW

Vandy Rahmarta*

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Grace T. Pontoh

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Darwis Said

Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Penulis Koresponden: vandy.r@pu.go.id

Abstrak:

Tujuan penelitian: Artikel ini membahas pentingnya pencegahan fraud dalam organisasi, dengan fokus pada organisasi sektor publik maupun non-publik. Tinjauan literatur mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem pencegahan fraud, seperti teori *fraud triangle*, teori atribusi, teori *stewardship*, dan budaya organisasi.

Metode: Riset ini menggunakan metode pengumpulan data dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis 32 jurnal terkait pencegahan *fraud*. Dari penelitian ini, disoroti perlunya peningkatan investasi dalam pembangunan dan promosi *whistleblowing system* yang bagus, *e-Procurement* termasuk implementasinya, dan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etis sebagai strategi pencegahan *fraud* di sektor publik dan non-publik.

Temuan penelitian: Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan dan kesimpulan berdasarkan temuan dari berbagai penelitian terkait, dengan fokus pada efektivitas langkah-langkah pencegahan *fraud*.

Implikasi praktis: Riset ini juga memberikan landasan kuat untuk pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan *fraud* yang lebih efektif dan komprehensif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan integritas dan transparansi di berbagai tingkat organisasi dan pemerintahan.

Kata kunci: *Fraud*; Pencegahan *Fraud*; Pengadaan Barang/Jasa; *System Literature Review*.

Abstract:

Research objective: This article discusses the importance of fraud prevention in organizations, focusing on both public and non-public sectors. A deep literature review explores factors influencing the successful implementation of fraud prevention systems, such as the *fraud triangle* theory, attribution theory, *stewardship* theory, and organizational culture.

Method: The research employs a *Systematic Literature Review* (SLR) method to identify, evaluate, and synthesize findings from 32 journals related to fraud prevention. The study highlights the need for increased investment in developing and promoting effective *whistleblowing* systems, *e-Procurement* implementation, and fostering an organizational culture that supports ethical values as strategies for fraud prevention in both public and non-public sectors.

Research findings: It provides policy recommendations and conclusions based on the findings of various related studies, emphasizing the effectiveness of fraud prevention measures.

Practical implication: The research also lays a strong foundation for the development of more effective and comprehensive fraud prevention policies and practices, ultimately enhancing integrity and transparency across various organizational and governmental levels.

Keywords: Fraud; Fraud Prevention; Procurement of Goods/Services; Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, ancaman *fraud* telah menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai jenis organisasi baik sektor publik maupun bisnis. *Fraud* bisa menyebabkan peluang kerugian yang signifikan pada beberapa hal seperti kerugian keuangan, bisa merusak nama baik atau *personal branding* sebuah organisasi, serta bahkan bisa mengancam kelangsungan hidup suatu entitas. Oleh karena itu, pencegahan *fraud* telah menjadi fokus utama bagi para pemimpin organisasi dan peneliti dalam upaya untuk melindungi keberlanjutan dan integritas organisasi. *Fraud* dalam berbagai kegiatan termasuk pengadaan barang/jasa merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan proses pengadaan dapat mengarah pada pemborosan sumber daya, peningkatan biaya, atau bahkan penurunan kualitas barang/jasa yang diperoleh. Untuk mencegah terjadinya *fraud*, perlu diterapkan berbagai sistem dan strategi yang efektif. Salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah ini adalah melalui *system literature review* yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Pengendalian intern adalah salah satu komponen integral dalam setiap organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset, menjaga integritas informasi, dan mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, pengendalian internal memainkan peran krusial dalam mencegah terjadinya tindakan *fraud* yang dapat merugikan organisasi secara finansial dan reputasional.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama untuk mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam pencegahan *fraud*. Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey menyatakan bahwa *fraud* terjadi ketika tiga elemen—tekanan, peluang, dan rasionalisasi—bersatu. Dengan memahami dan mengurangi elemen-elemen ini, organisasi dapat lebih efektif mencegah *fraud*. Teori Atribusi berfokus pada bagaimana individu dalam organisasi menilai penyebab perilaku *fraud* dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi respon mereka terhadap tindakan pencegahan. Hal ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Teori *Stewardship* menawarkan pandangan bahwa hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen, mengurangi kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Teori ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab. Budaya organisasi juga menjadi fokus, dengan penelitian menekankan bahwa budaya yang kuat dan etis dapat mendorong perilaku yang jujur dan transparan. Faktor-faktor seperti nilai-nilai perusahaan, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang etis memainkan peran penting dalam membentuk budaya tersebut. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, penelitian ini mampu memberikan landasan yang kuat untuk strategi pencegahan *fraud* yang lebih holistik dan efektif, khususnya melalui penguatan sistem *whistleblowing* dan implementasi teknologi seperti *e-Procurement* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Riset sebelumnya ditemukan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *Internal locus of control* secara positif memengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan (Puspita and Ratnadi 2023). Artinya, peningkatan kompetensi aparatur desa, implementasi sistem pengendalian internal yang memadai, serta adanya *internal locus of control* yang positif dapat meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Selanjutnya, dalam penelitian lainnya ditemukan bahwa pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Farochi and Nugroho 2022). Variabel pengendalian internal juga mempengaruhi positif terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu, *whistleblowing system*, implementasi *e-procurement*, etika pegawai, dan budaya organisasi memiliki dampak terhadap efektivitas pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, sementara *good governance* tidak memberikan pengaruh yang signifikan (Rahayu, Ratnawati, and Silfi 2023). Mengingat perbedaan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pencegahan fraud, maka kami tertarik untuk membandingkan beberapa jurnal lain yang fokus pada pencegahan fraud, khususnya di konteks Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa *research gap* yang membedakannya dari penelitian sebelumnya dalam bidang pencegahan fraud. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada satu teori atau model, seperti teori *fraud triangle*, sedangkan penelitian ini memperluas cakupan dengan menggabungkan teori *fraud triangle*, teori atribusi, teori *stewardship*, dan budaya organisasi, memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi teknologi, seperti *e-Procurement*, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang sering kurang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menekankan kebutuhan akan sistem *whistleblowing* yang lebih efektif dan aman, dengan fokus pada perlindungan pelapor dan cara meningkatkan kepercayaan dalam sistem ini. Selanjutnya, penelitian ini memberikan panduan spesifik untuk pencegahan fraud di sektor publik dan non-publik, mengakui perbedaan konteks dan kebutuhan masing-masing sektor, yang sering diabaikan dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya budaya organisasi yang kuat dan etis dalam mendorong perilaku jujur dan mencegah fraud, memberikan wawasan tambahan tentang internalisasi nilai-nilai etis. Akhirnya, penelitian ini menekankan perlunya pengumpulan data empiris yang kuat dan implementasi langkah-langkah praktis yang didukung oleh bukti, mengisi kekosongan dalam literatur yang cenderung bersifat teoretis tanpa uji coba lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih kaya dan beragam dalam memahami dan mengembangkan strategi pencegahan fraud yang efektif.

Penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan dalam aspek teori, metode, dan empiris. Dalam hal kebaruan teori (*theoretical novelty*), penelitian ini menggabungkan beberapa teori utama – teori *fraud triangle*, teori atribusi, teori *stewardship*, dan budaya organisasi – untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik mengenai pencegahan fraud. Dalam aspek metode (*method novelty*), penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang terstruktur dan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah yang relevan, yang memungkinkan integrasi berbagai perspektif dan temuan dari studi sebelumnya. Dari sisi empiris (*empirical novelty*), penelitian ini menyoroti perlunya pengumpulan data empiris yang kuat dan implementasi langkah-langkah praktis yang didukung oleh bukti, khususnya dalam konteks integrasi teknologi seperti *e-Procurement* dan pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif, serta pembedaan strategi antara sektor publik dan non-

publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam teori, metode, dan bukti empiris yang dapat memperkuat strategi pencegahan *fraud* secara keseluruhan.

Riset ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pencegahan *fraud* dalam organisasi sektor publik dan non-publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana teori *fraud triangle*, teori atribusi, teori *stewardship*, dan budaya organisasi dapat digunakan untuk membentuk strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: "Apa saja elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencegahan *fraud* dalam organisasi, dan bagaimana integrasi teknologi serta sistem *whistleblowing* dapat memperkuat upaya tersebut?" Melalui analisis mendalam dari literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan *fraud* yang dapat meningkatkan integritas dan transparansi di berbagai tingkat organisasi. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi praktis yang signifikan dalam pencegahan *fraud* di organisasi. Pertama, penelitian ini menekankan pentingnya investasi dalam sistem *whistleblowing* yang efektif, yang memungkinkan karyawan melaporkan tindakan *fraud* tanpa takut akan pembalasan. Kedua, penelitian ini menggarisbawahi perlunya implementasi teknologi seperti *e-Procurement* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, sehingga mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Ketiga, penelitian ini menekankan pentingnya membangun budaya organisasi yang kuat dan etis, yang dapat mendorong perilaku jujur dan mengurangi insentif untuk melakukan *fraud*. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif dengan mengadaptasi pendekatan berdasarkan konteks sektor publik dan non-publik. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan integritas dan transparansi di berbagai tingkat organisasi dan pemerintahan. Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait dengan tinjauan literatur mengenai dampak faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan secara umum, khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa. Aspek-aspek tersebut mencakup peran manajemen, pengendalian internal, etika, teknologi, dan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, tulisan ini juga akan menyajikan contoh-contoh penelitian terbaru yang mengilustrasikan keberhasilan penerapan tinjauan literatur dalam mengurangi risiko kecurangan, baik secara umum maupun dalam konteks pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, artikel ini juga bertujuan untuk membantu entitas-entitas khususnya yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk lebih memahami pentingnya *system literature review* dan bagaimana implementasinya dapat menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*. Semakin meningkatnya kesadaran akan risiko *fraud* dalam pengadaan, semakin perlunya *system literature review* sebagai alat yang dapat membantu melindungi entitas dari kerugian yang mungkin timbul akibat praktik-praktik tidak jujur dan penipuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini menggabungkan beberapa teori utama untuk memahami dan mencegah *fraud* dalam organisasi. Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa *fraud* terjadi ketika tekanan, peluang, dan rasionalisasi hadir, sehingga upaya pencegahan harus mengurangi salah satu atau lebih dari ketiga elemen ini. Teori Atribusi menyoroti bagaimana individu menilai penyebab perilaku *fraud* dan bagaimana penilaian ini mempengaruhi respon mereka terhadap langkah-langkah pencegahan. Teori *Stewardship* berfokus pada hubungan antara manajemen dan karyawan, dengan asumsi bahwa manajemen yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Selain itu, budaya organisasi memainkan peran penting dalam pencegahan *fraud*; budaya yang kuat dan etis dapat mendorong perilaku jujur dan mengurangi insentif untuk melakukan *fraud*, dengan faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, dan nilai-nilai perusahaan yang membentuk budaya ini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya investasi dalam sistem *whistleblowing* yang efektif, yang memungkinkan karyawan melaporkan tindakan *fraud* tanpa takut akan pembalasan, serta implementasi *e-Procurement* yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Terakhir, penelitian ini membedakan strategi pencegahan yang diperlukan di sektor publik dan non-publik, menyesuaikan pendekatan berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik setiap sektor. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, penelitian ini dapat mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif dan holistik.

Teori

Teori segitiga penipuan (*Fraud Triangel*) pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Dr. Donald Cressey pada tahun 1953, yang juga merupakan salah satu pendiri ACFE (Karyono, 2013). Menurut Cressey, terdapat tiga faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku penipuan (Sudarmanto 2023):

Tekanan (*Pressure*)

Manajer dan karyawan, keduanya dapat merasa didorong untuk terlibat dalam penipuan. Pendorong utamanya melibatkan tekanan keuangan, kebiasaan buruk, pengaruh dari lingkungan kerja, dan tekanan lainnya seperti keinginan untuk gaya hidup yang mewah.

Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan muncul akibat lemahnya pengendalian internal, ketidakjelasan sanksi dan prosedur dalam organisasi, serta peran yang kurang aktif dari audit internal dalam organisasi.

Pembenaran (*Rationalization*)

Tindakan penipuan dapat dibenarkan oleh individu dikarenakan penipuan dilihat sebagai tindakan yang wajar, tidak merasa dihargai oleh organisasi atas kontribusinya, sehingga merasa berhak mendapatkan lebih, dan ada anggapan bahwa tujuan penipuan sebenarnya baik.



Gambar 1. Segitiga Fraud

Teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, membahas bagaimana seseorang memahami dan memberikan alasan atas perilaku tertentu. Menurut teori ini, ada dua jenis alasan dibalik tindakan seseorang: alasan internal yang berasal dari dalam diri, seperti kompetensi, dan alasan eksternal yang bersumber dari dorongan luar, misalnya, budaya organisasi dalam lingkungan (Budyatna 2015). Menurut Hughes & Gibson (1987), teori atribusi melibatkan proses persepsi dan penarikan kesimpulan untuk menghubungkan sebab dan akibat dari perilaku atau peristiwa yang diamati di lingkungan sekitar (Butarbutar et al. 2021). Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang memahami orang lain dan kondisi di sekitarnya. Settle & Golden (1974) menyatakan bahwa individu cenderung mengaitkan peristiwa yang mereka amati dengan penilaian sebab-akibat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Gustantyo, Pradekso, and Ulfa 2022). Calder (1977) juga menyumbangkan pandangannya terhadap teori atribusi, menggambarkan sebagai suatu cara menyimpulkan tentang perilaku yang mungkin tidak sesuai. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada masalah sehari-hari, mencoba memberikan penjelasan ilmiah untuk berbagai situasi. Meskipun teori atribusi dapat dianggap terlalu umum dalam beberapa kasus, tujuannya adalah menciptakan konsep penjelasan sehari-hari yang dapat diterapkan secara ilmiah untuk menjelaskan perilaku manusia.

Raharjo (2007) mengemukakan bahwa teori *stewardship* mencerminkan usaha manajer untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama (Dermawan 2022). Meskipun, jika kepentingan bersama antara *steward* dan pemangku kepentingan tidak sejalan, *steward* akan tetap bekerja tanpa menentang. Davis dan rekan (1997) mengindikasikan bahwa pertimbangan terhadap kepentingan bersama menjadi krusial dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Teori *stewardship* ini diasumsikan memiliki korelasi antara pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan pemiliknya (Suseno 2022). Definisi teori *stewardship* oleh Davis dan kawan-kawan (1997) mencirikan suatu kondisi di mana manajer tidak memiliki motivasi terhadap tujuan atau kepentingan pribadi, melainkan sepenuhnya fokus pada tujuan bersama (Suseno 2022). Terdapat hubungan psikologis dan sosiologis dalam teori ini, dirancang untuk memungkinkan peneliti memeriksa apakah *steward* memiliki motivasi yang kuat untuk kepentingan para pemilik. Para peneliti mengasumsikan bahwa hubungan erat antara *steward* dan keberhasilan organisasi dapat memaksimalkan fungsi pelayanan. Keay (2017) menjelaskan bahwa teori *stewardship* berusaha menggambarkan

konsep peran pemimpin yang mempertimbangkan pentingnya akuntabilitas, didasarkan pada kepercayaan dan profesionalisme pemimpin.

Budaya organisasi merujuk pada norma, nilai, asumsi, dan kepercayaan yang terbentuk dan diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai panduan berorganisasi (Suastawan dkk, 2017). Budaya organisasi memiliki peran penting dalam mencegah tindakan kecurangan (Zelmiyanti and Anita 2015). Upaya pencegahan dilakukan melalui pengembangan budaya kerja yang baik, yang menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi, seperti menghargai kejujuran, integritas, penghargaan terhadap kualitas kerja, pelayanan yang optimal, dan menghormati keterbukaan serta transparansi.

Berdasarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008), pencegahan *fraud* adalah suatu pendekatan terpadu yang dapat mengurangi faktor pemicu *fraud* atau *fraud triangle* (Roza and Muhammad 2020). Faktor pemicu *fraud* melibatkan motif, rasionalisasi, dan peluang. Motif dan rasionalisasi berkaitan erat dengan karakteristik pribadi pelaku *fraud*, menjadi dorongan internal. Sementara itu, peluang merupakan faktor internal dalam organisasi. Secara tidak langsung, *fraud* dapat dicegah melalui faktor internal organisasi seperti budaya organisasi dan sistem pengendalian internal, baik dalam sektor publik maupun non-publik. Budaya organisasi yang baik dan sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengatasi atau mencegah faktor pemicu *fraud*.

METODE

Paradigma

Penelitian ini menggunakan pendekatan *System Literature Review* (SLR). SLR, atau Tinjauan Pustaka Sistematis, adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan semua penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Tujuan utama dari SLR adalah menyusun kembali informasi yang ada dari penelitian yang relevan dan merespons pertanyaan penelitian dengan memanfaatkan data empiris yang tersedia. Penggunaan metode ini dapat membantu mengurangi bias dalam pemilihan artikel dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Karena itu, SLR sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, psikologi, dan teknologi informasi (Santika, Triandini, and Ayu 2023). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis, yang menggabungkan analisis teoritis dan empiris untuk memahami dan menjelaskan fenomena pencegahan *fraud* dalam organisasi. Pendekatan ini tercermin dalam penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang terstruktur dan berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur ilmiah yang relevan. Paradigma post-positivis juga terlihat dalam upaya penelitian untuk mengintegrasikan berbagai teori seperti teori *fraud triangle*, teori atribusi, teori *stewardship*, dan budaya organisasi guna mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pencegahan *fraud*. Dalam konteks ini, penelitian post-positivis mengakui kompleksitas dan keragaman faktor yang mempengaruhi *fraud*, serta pentingnya menggunakan pendekatan multi-disiplin untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara kritis mengevaluasi dan mensintesis berbagai temuan dari literatur, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris dan teoritis. Dengan demikian, paradigma post-positivis yang digunakan dalam penelitian ini membantu memberikan landasan yang kuat untuk

pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan *fraud* yang lebih efektif dan komprehensif.

Metode Pengumpulan Data

Dalam artikel ini, pencarian literatur dilakukan secara daring melalui aplikasi *Harzing's Publish or Perish* (Windows GUI Edition) 8.9.4538.8589 dengan sumber informasi dari *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan mencakup "Pencegahan *Fraud*", "Sistem Pengendalian Intern", dan "Pengadaan Barang/Jasa", dengan rentang waktu pencarian antara tahun 2015 hingga 2023, dan jumlah maksimum temuan data dibatasi hingga 200. Pencarian literatur difokuskan pada jurnal penelitian dengan pendekatan empiris (kualitatif dan kuantitatif). Literatur yang dianalisis khususnya merupakan penelitian yang dilakukan di organisasi Indonesia, mengingat perbedaan dalam sistem pemerintahan dan keorganisasian antar negara. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada Indonesia untuk mendalami upaya pencegahan *fraud*, baik dalam sektor publik maupun non-publik.

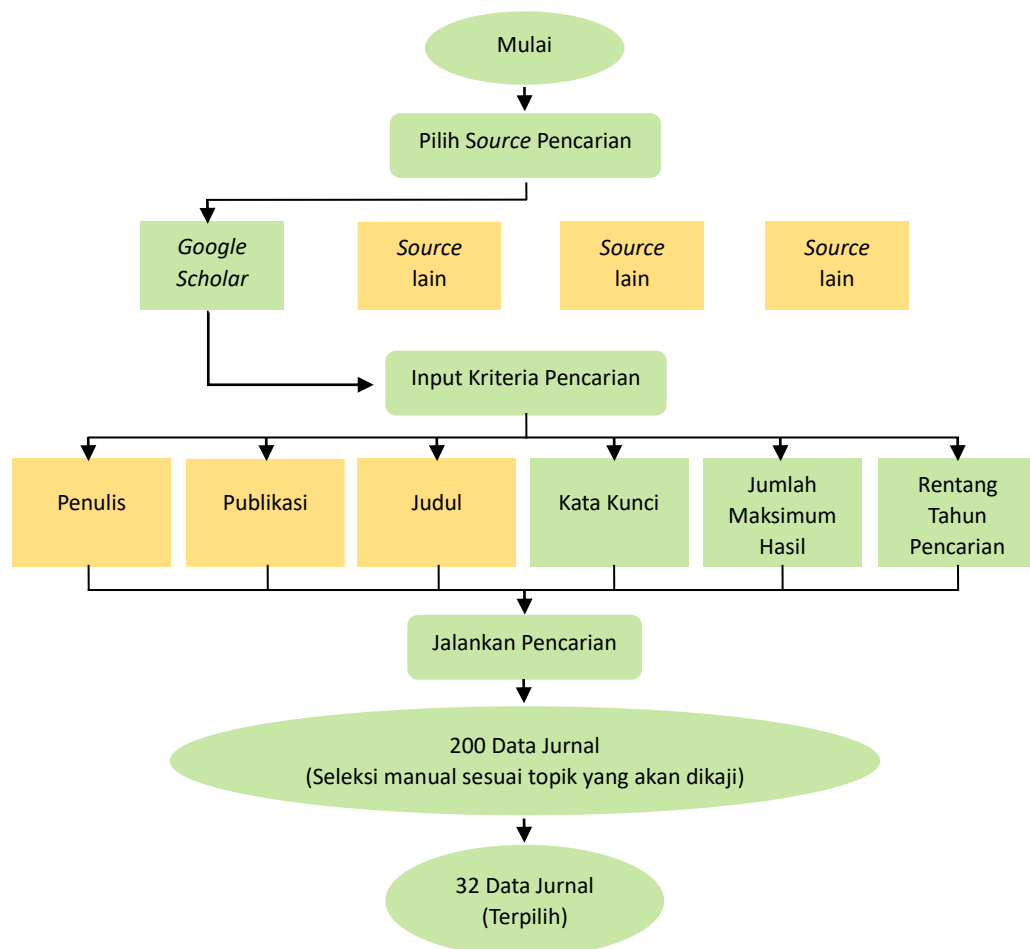
Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan atau berfokus membandingkan hasil penelitian dari 32 jurnal yang telah dipilih terkait faktor apa saja dan seberapa berpengaruh faktor-faktor tersebut dalam mencegah terjadinya *fraud* sesuai dengan penelitian masing-masing jurnal. Berdasarkan tujuan tersebut, proses pemilihan jurnal dilakukan secara manual dengan melihat kesesuaian isi jurnal dengan tujuan artikel ini. Hasil pemilihan jurnal diarsipkan melalui aplikasi *Harzing's Publish or Perish* untuk mempermudah kegiatan penulisan. Dari 200 jurnal yang ditemukan, dipilih 32 jurnal yang membahas terkait faktor-faktor dalam pencegahan *fraud*. Proses pencarian *literature* atau jurnal dapat lihat pada Gambar 2 dan tampilan hasil pencarian dapat dilihat pada Gambar 3.

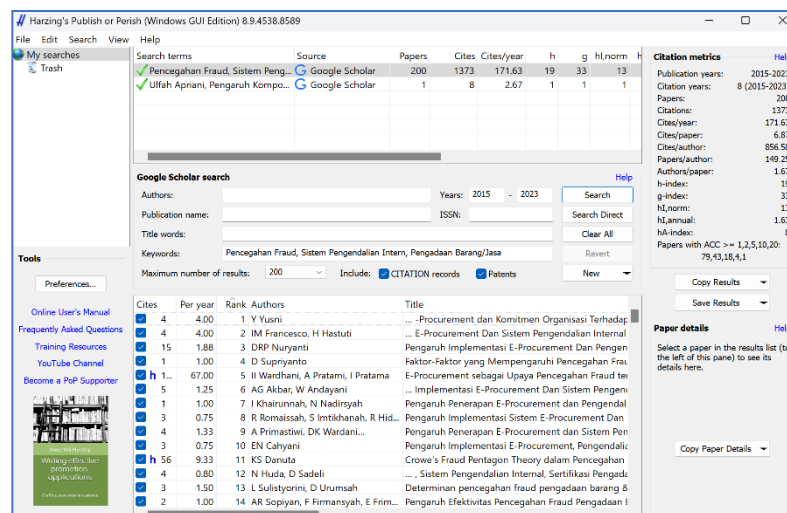
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari 32 jurnal yang direviu rata-rata semua bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh berbagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*. Berdasarkan jurnal yang di reviu terdapat 26 variabel yang diuji dan dibuktikan apakah faktor tersebut berpengaruh dalam usaha pencegahan *fraud*, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.



Gambar 2. Tahapan Pencarian Jurnal/Artikel

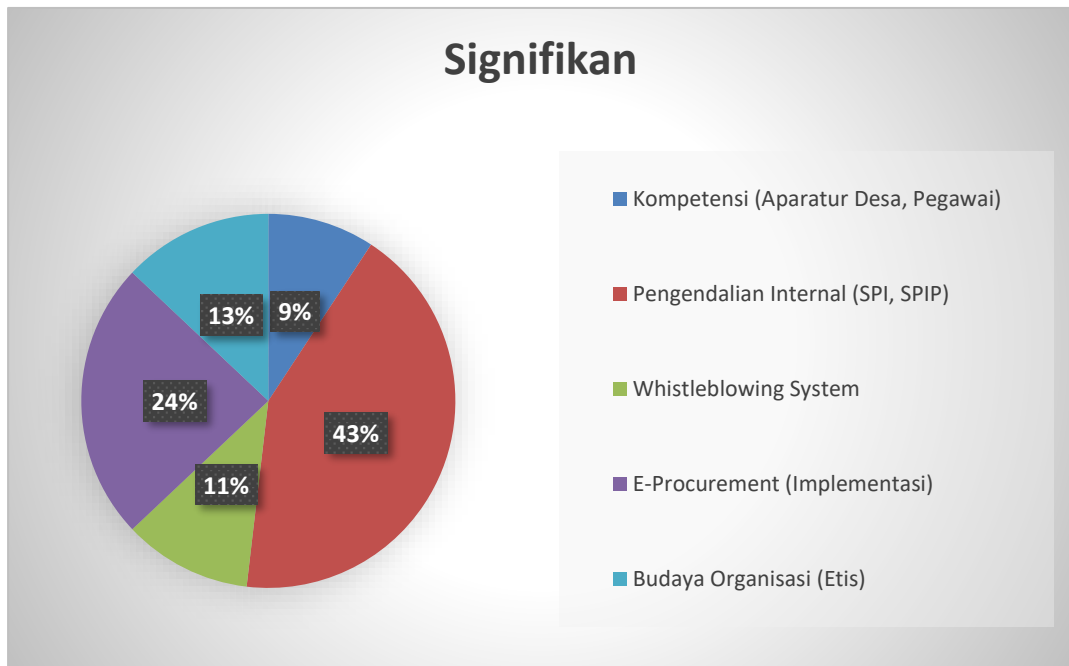


Gambar 3. Tampilan Aplikasi Harzing's Publish or Perish

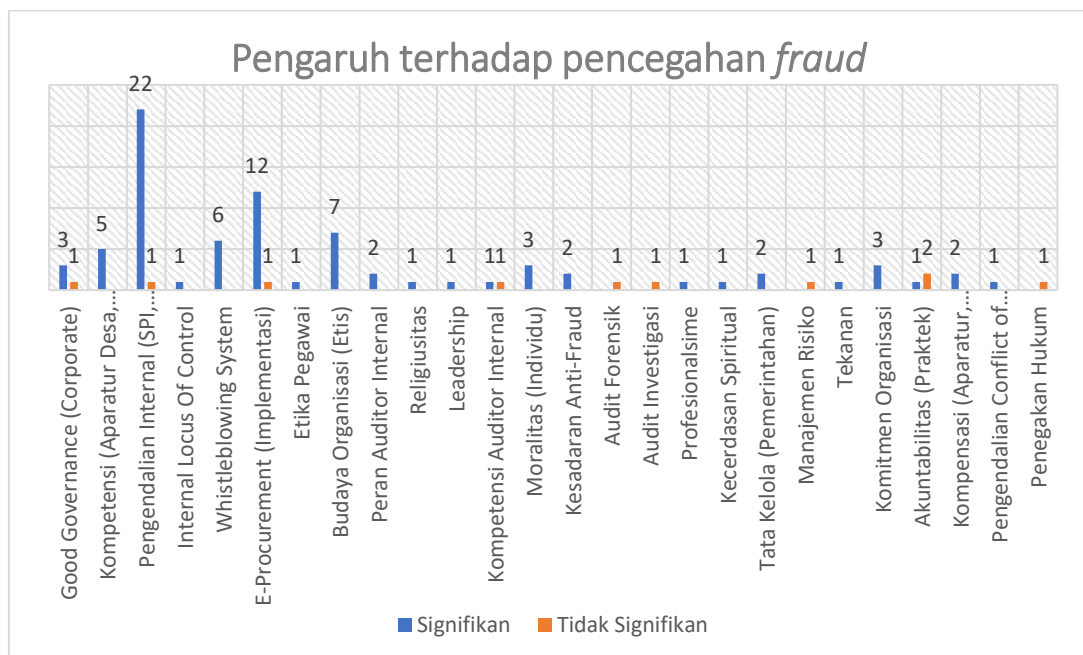
Tabel 1. Variabel yang diuji dalam 32 jurnal

No.	Variabel yang diuji	Jumlah Jurnal
1	<i>Good Governance (Corporate)</i>	4
2	Kompetensi (Aparatur Desa, Pegawai)	5
3	Pengendalian Internal (SPI, SPIP)	23
4	<i>Internal Locus Of Control</i>	1
5	<i>Whistleblowing System</i>	6
6	<i>E-Procurement</i> (Implementasi)	13
7	Etika Pegawai	1
8	Budaya Organisasi (Etis)	7
9	Peran Auditor Internal	2
10	Religiusitas	1
11	<i>Leadership</i>	1
12	Kompetensi Auditor Internal	2
13	Moralitas (Individu)	3
14	<i>Anti-Fraud</i>	2
15	Audit Forensik	1
16	Audit Investigasi	1
17	Profesionalisme	1
18	Kecerdasan Spiritual	1
19	Tata Kelola (Pemerintahan)	2
20	Manajemen Risiko	1
21	Tekanan	1
22	Komitmen Organisasi	3
23	Akuntabilitas (Praktek)	3
24	Kompensasi (Aparatur, Kesesuaian)	2
25	Pengendalian <i>Conflict of Interest</i>	1
26	Penegakan Hukum	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 5 variabel yang sering diteliti dan mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam jurnal yang di reviu, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Persentase Signifikansi terhadap pencegahan *fraud*



Gambar 5. Pengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan data pada Gambar 4 dan Gambar 5, terlihat bahwa terdapat lima variabel yang paling sering diuji dalam beberapa jurnal yang dianalisis, yaitu Kompetensi (Aparatur Desa, Pegawai) dengan jumlah 5 jurnal, Pengendalian Internal (SPI, SPIP)

dengan jumlah 23 jurnal, *Wistleblowing System* dengan jumlah 6 jurnal, *E-Procurement* (Implementasi) dengan jumlah 13 jurnal, dan Budaya Organisasi (Etis) dengan jumlah 7 jurnal. Menurut Gambar 5, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor menunjukkan signifikansi pengaruh yang berbeda terhadap pencegahan fraud pada beberapa jurnal, antara lain *Good Governance (Corporate)*, Pengendalian Internal (SPI, SPIP), *E-Procurement* (Implementasi), Kompetensi Auditor Internal, dan Akuntabilitas (Praktek).

Pembahasan

Kompetensi (Aparatur Desa, Pegawai)

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa tingkat kompetensi aparat desa dan pegawai memberikan dampak yang signifikan pada usaha pencegahan *fraud*, baik di sektor publik maupun non-publik. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kompetensi, terutama dalam aspek keahlian teknis, keterampilan interpersonal, dan pemahaman etika, secara positif terkait dengan efektivitas pencegahan *fraud*. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan kompetensi sebagai strategi proaktif untuk mengurangi potensi kecurangan di dalam organisasi. Implikasi praktis dari penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan meningkatkan integritas dan tata kelola di kedua sektor tersebut. Rekomendasi kebijakan mencakup perluasan program pelatihan, peningkatan kontrol internal, dan peningkatan kesadaran akan risiko *fraud* di kalangan aparat desa dan pegawai, dengan mempertimbangkan perbedaan kontekstual antara sektor publik dan non-publik.

Pengendalian Internal (SPI, SPIP)

Penelitian ini mengemukakan peran krusial pengendalian internal, yang mencakup sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian internal pemerintah, dalam usaha pencegahan *fraud* di sektor publik dan non-publik. Temuan penelitian menyiratkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal yang efisien berkaitan positif dengan tingkat keberhasilan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal yang *robust* mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya mengurangi peluang kejadian *fraud*, tetapi juga meningkatkan kemampuan deteksi dini dan tanggapan terhadap potensi kecurangan. Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan perlunya penekanan pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem pengendalian internal sebagai elemen integral dari strategi pencegahan *fraud*. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal di seluruh organisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelatihan terkait etika dan integritas. Kesimpulan ini membentuk dasar untuk pengembangan kebijakan yang memfokuskan pada pengendalian internal guna meningkatkan tata kelola dan integritas di sektor publik maupun non-publik.

Wistleblowing System

Penelitian ini menjelaskan pentingnya dampak *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan *fraud*, baik di sektor publik maupun non-publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan efektivitas *whistleblowing system* memiliki hubungan positif dengan tingkat keberhasilan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sistem ini membuka saluran komunikasi yang aman dan terjamin bagi para pelapor untuk melaporkan potensi kecurangan, menciptakan iklim organisasional yang mendorong

akuntabilitas dan transparansi. Implikasinya adalah perlunya peningkatan investasi dalam pengembangan dan promosi *whistleblowing system* yang handal, dengan memperhatikan kemudahan akses mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi para pelapor. Rekomendasi kebijakan mencakup pengembangan budaya organisasi yang mendukung pengungkapan informasi, pelatihan bagi potensial pelapor, dan evaluasi rutin terhadap efektivitas *whistleblowing system*. Kesimpulan ini memberikan dasar bagi langkah-langkah penguatan mekanisme pelaporan guna mencegah dan menanggulangi *fraud* di kedua sektor tersebut.

E-Procurement (Implementasi)

Penelitian ini menekankan manfaat positif dari penerapan *e-Procurement* dalam upaya pencegahan *fraud* di sektor publik dan non-publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *e-Procurement* secara signifikan memberikan kontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan memanfaatkan platform digital, adopsi *e-Procurement* membantu mengurangi risiko *fraud* melalui otomatisasi proses, pemantauan *real-time*, dan peningkatan pengawasan. Implikasinya adalah perlunya mendorong lebih lanjut implementasi *e-Procurement* sebagai strategi yang efektif dalam mencegah *fraud*. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan terkait keamanan siber, dan pengembangan regulasi yang mendukung pemanfaatan *e-Procurement*. Kesimpulan ini mengkonfirmasi bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan tata kelola dan integritas di sektor publik maupun non-publik.

Budaya Organisasi (Etis)

Penelitian ini menemukan bahwa budaya organisasi yang dipenuhi dengan nilai-nilai etis memiliki dampak positif terhadap upaya pencegahan *fraud*, baik di sektor publik maupun non-publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang mempromosikan etika dalam budaya kerjanya cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Budaya organisasi yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab memberikan dasar yang kokoh untuk membentuk perilaku yang sejalan dengan norma-norma etis. Implikasinya adalah perlunya penekanan pada pengembangan dan penguatan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari strategi pencegahan *fraud*. Rekomendasi kebijakan mencakup inisiatif pendidikan budaya, komunikasi yang jelas mengenai nilai-nilai organisasi, serta pemberian insentif untuk perilaku yang mengedepankan etika. Kesimpulan ini menyoroti peran kunci budaya organisasi dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya mengurangi potensi kecurangan tetapi juga mendorong prinsip-prinsip integritas di semua lapisan organisasi.

Perbedaan implementasi faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* di sektor publik dan non-publik.

Perbedaan signifikan dalam hasil faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan dan non-pemerintahan mencerminkan perbedaan fundamental dalam struktur, regulasi, dan tujuan masing-masing sektor. Organisasi pemerintahan, yang sering kali tunduk pada regulasi ketat dan pengawasan, cenderung menempatkan penekanan pada kepatuhan terhadap norma-norma hukum pemerintah. Dalam hal struktur organisasi, pemerintahan cenderung memiliki hierarki yang ketat dan budaya

yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Pencegahan *fraud* di sektor ini sering berpusat pada transparansi dan akuntabilitas.

Sebaliknya, organisasi non-pemerintahan, dengan struktur yang lebih fleksibel dan budaya yang lebih terbuka terhadap inovasi, dapat mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis terhadap pencegahan *fraud*. Meskipun juga tunduk pada regulasi, tingkat kepatuhan biasanya lebih bervariasi. Organisasi non-pemerintahan dapat memiliki kebijakan internal dan nilai-nilai organisasional yang berpengaruh pada pendekatan mereka terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, alokasi sumber daya dan anggaran di sektor non-pemerintahan dapat lebih terkendali, memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi sistem pencegahan *fraud*.

Tujuan dan kriteria keberhasilan juga dapat bervariasi, sementara organisasi pemerintahan mungkin menekankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik dan keadilan sosial, organisasi non-pemerintahan mungkin lebih berfokus pada tujuan bisnis atau tujuan sosial tertentu. Adanya perbedaan ini dapat tercermin dalam respons terhadap tindakan pencegahan *fraud*, termasuk dampaknya pada media dan opini publik. Organisasi pemerintahan mungkin menghadapi perhatian media yang lebih besar, sementara organisasi non-pemerintahan mungkin dapat menjalankan strategi pencegahan *fraud* dengan dampak yang lebih lokal. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap perbedaan ini menjadi krusial dalam mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang efektif di kedua sektor ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pencegahan *fraud* dalam organisasi, khususnya di sektor publik dan non-publik, memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai faktor dan sistem. Faktor-faktor kekuatan organisasi seperti budaya organisasi dan sistem pengendalian internal serta faktor-faktor sistem dalam organisasi seperti *whistleblowing system*, dan implementasi *e-Procurement* memainkan peran sentral dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan investasi dalam pengembangan dan promosi *whistleblowing system* yang handal, implementasi *e-Procurement*, serta budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etis sebagai strategi pencegahan *fraud* di kedua sektor tersebut. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi pencegahan *fraud* yang efektif di dalam organisasi publik dan non-publik.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian dengan fokus pada implementasi konkret dari rekomendasi kebijakan yang telah diajukan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan geografis dan sektor organisasi yang diteliti, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pencegahan *fraud* juga dapat diperluas, sambil mempertimbangkan dampak teknologi dan inovasi terkini dalam upaya pencegahan *fraud*. Sebagai tambahan, penelitian mendatang dapat mengakomodasi perspektif praktisi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan implementasi kebijakan pencegahan *fraud* yang lebih efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, metode *Systematic Literature Review (SLR)* yang digunakan, meskipun kuat, berisiko melewati beberapa penelitian penting karena kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, serta kemungkinan adanya bias seleksi. Kedua, ketergantungan pada data sekunder dari jurnal yang sudah diterbitkan membatasi kontrol peneliti atas variabel penelitian asli dan kualitas data. Ketiga, keberagaman metodologi, konteks, dan sampel dari studi yang dianalisis dapat menyulitkan generalisasi temuan. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pencegahan *fraud* mungkin berbeda antara sektor publik dan non-publik, serta antar negara atau budaya, sehingga generalisasi dari satu konteks ke konteks lain mungkin tidak selalu tepat. Kelima, penelitian ini mungkin kekurangan data empiris yang kuat dan bukti langsung dari implementasi langkah-langkah pencegahan *fraud*, sehingga lebih bersifat konseptual dan teoretis. Keenam, meskipun *e-Procurement* disebutkan sebagai salah satu strategi, penelitian ini mungkin kurang mendalami peran teknologi canggih lainnya dalam pencegahan *fraud*. Ketujuh, rentang waktu publikasi dari studi yang dianalisis mungkin luas, sehingga beberapa temuan bisa saja sudah tidak relevan dengan perkembangan terkini. Terakhir, variasi dalam definisi dan pengukuran *fraud* di antara studi yang dianalisis dapat mempengaruhi konsistensi dan validitas temuan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini, penelitian di masa depan sebaiknya fokus pada pengumpulan data primer, uji empiris, dan penerapan teknologi baru untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari tinjauan literatur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyatna, Muhammad. 2015. *Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antar-Pribadi*. Prenada Media.
- Butarbutar, Marisi, Iskandar Kato, Syafrida Hafni Sahir, Nana Triapnita Nainggolan, Ince Weya, Sudung Simatupang, Sukarman Purba, Sisca Sisca, Novita Butarbutar, and Darwin Lie. 2021. "Teori Perilaku Organisasi."
- Dermawan, Risky. 2022. "Memahami Good Corporate Governance (GCG) Dan E-Government Dalam Menangani Masalah Korupsi."
- Farochi, M. Fahmullah Fauzal, and Arief Himmawan Dwi Nugroho. 2022. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 6(1):86–92. doi: 10.23887/jppsh.v6i1.46071.
- Gustantyo, Nicho Putera, Tandiyo Pradekso, and Nurist Surayya Ulfa. 2022. "Pengaruh Daya Tarik Lazada E-Commerce, Promosi Penjualan Di Instagram Lazada, Dan Brand Ambassador Terhadap Minat Bertransaksi Di Lazada." *Interaksi Online* 10(3):239–51.
- Puspita, Ni Kadek Mega Cahya, and Ni Made Dwi Ratnadi. 2023. "Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, Dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 33(2):346. doi: 10.24843/eja.2023.v33.i02.p05.
- Rahayu, Suspa, Vince Ratnawati, and Alfia Silfi. 2023. *Analysis Of The Factors Affecting The Effectiveness Of Preventing Fraud In The Procurement Of Goods And Service (An Empirical Study On Regional Apparatus Organization Of Pekanbaru City)*. Vol. 499.
- Roza, Mulyadi, and Nawawi Muhammad. 2020. "Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada BPKP Provinsi Banten)." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 13(2):272–94.
- Santika, Komang Yuli, Evi Triandini, and Putu Desiana Wulaning Ayu. 2023. "Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Pemilihan Database Management System Dalam Pengembangan Sistem." *Prosiding CORISINDO 2023*.
- Sudarmanto, Eko. 2023. *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran*. Zahir Publishing.
- Suseno, Bambang Dwi. 2022. "Suksesi Perusahaan Keluarga Berkelanjutan: Sinyal Mendeteksi Putra Mahkota."
- Zelmiyanti, Riri, and Lili Anita. 2015. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 8(10):67–76.